

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PARIWISATA PASAR REBO PURNAWARMAN SITU
BULEUD DI KABUPATEN PURWAKARTA**

*Policy Strategy Development Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud In
Purwakarta District*

¹Cika Siskawati, ²Sutarto Mochtar, ³Edah Jubaedah

¹ Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta

^{2,3}Politeknik STIA LAN Bandung

¹cika.siskawati@gmail.com, ²sutarto.mochtar@gmail.com, ³edah.jubaedah@gmail.com

**INFORMASI
ARTIKEL**

ABSTRAK

Article history :

Dikirim :

20-04-2022

Revisi Pertama :

21-06-2022

Diterima :

22-06-2022

Kata Kunci :

*Strategi Kebijakan
Pengembangan*

Keywords :

*Development Policy
Strategy*

Penelitian strategi implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Pariwisata Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud dilatarbelakangi oleh permasalahan belum adanya keterlibatan berbagai pihak, ketersediaan sumber daya, masih belum baiknya kesadaran masyarakat, keluhan pedagang, dan sikap pemerintah. Penelitian ini menggunakan analisis dengan model Van Meter Van Horn untuk menganalisis kebijakan dan Analisis SWOT dalam menganalisis strategi implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Pariwisata Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud. Hasil Penelitian menyimpulkan implementasi berdasarkan Analisa model Van Meter Van Horn diketahui implementasi berjalan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan daerah dan Misi dari Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam RPJMD Purwakarta, akan tetapi belum berjalan optimal. Strategi SWOT menyimpulkan strategi kebijakan yang harus ditempuh adalah membenahi pada sector pariwisata agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Jaminan keamanan dan ketentraman dari Pemda Purwakarta, promosi wisata dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, memperbaiki system perencanaan dan pengelolaan, pengoptimalan pengelolaan Kawasan, peningkatan SDM sector pariwisata, memperkuat koordinasi pengelola Kawasan, pengkoordiniran pedagang kaki lima, peningkatan kesadaran masyarakat, penyalarsan kebijakan, dan pengelolaan pedagang

Abstract

Research on policy strategies for the development of the Rebo Purnawarman Situ Buleud Market area is motivated by the problem of the lack of involvement of various parties, the availability of resources, the lack of public

awareness, traders' complaints, and the attitude of the government. This study uses analysis with the Van Meter Van Horn model to analyze policies and SWOT analysis in analyzing the development strategy of the Rebo Purnawarman Situ Buleud Market Area. The results of the study conclude that the implementation based on the Van Meter Van Horn model analysis is known to be running in accordance with the policies contained in the Regional Regulations and Missions of Purwakarta Regency contained in the Purwakarta RPJMD, but has not run optimally. The SWOT strategy concludes that the policy strategy that must be taken is to fix the tourism sector in order to increase economic growth, guarantee security and peace from the Purwakarta Regional Government, promote tourism in increasing economic activity, improve planning and management systems, optimize area management, increase human resources in the tourism sector, strengthen coordination Area management, coordinating street vendors, increasing public awareness, aligning policies, and managing traders.

A. PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur lalu-lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon yang merupakan jalur utama ke wilayah Jawa Tengah. Nama Purwakarta kini semakin tersohor dengan adanya Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta yang berada di Kawasan Situ Buleud seluas empat hektar. Perkembangan Kawasan Situ Buleud sangat cepat dan akhirnya dapat menjadi ikon pariwisata Purwakarta.

Kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Disamping dampak positif itu, kondisi peningkatan kunjungan wisatawan berimplikasi pada peningkatan jumlah kendaraan yang masuk Purwakarta seperti di sepanjang ruas jalan Yogja Dept Store - Simpang-Purnawarman, ruas jalan tersebut merupakan jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang. Namun, akibat perkembangan Situ Buleud di sepanjang ruas jalan tersebut, telah menimbulkan tarikan pergerakan yang signifikan, yang berakibat ruas jalan tersebut juga harus menampung arus pergerakan lokal yang akhirnya turut berperan dalam pembebanan ruas jalan Yogja-Simpang-Purnawar

Selain kemacetan Fenomena yang timbul dari pertemuan kawasan pariwisata Taman Air Mancur Sribaduga Situ Buleud dengan kawasan Pasar Rebo Purnawarman adalah banyaknya keluar masuk kendaraan, tidak tertatanya tempat parkir kendaraan pribadi dan kendaraan umum, lokasi Pasar Rebo yang berada pada pemotongan arus lalu lintas dan aktivitas Bongkar Pasang Barang, kawasan Pasar Rebo terlihat kumuh, kotor dan bau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti merasa perlu adanya sebuah kajian ilmiah atau penelitian mengenai Strategi implementasi kebijakan pengembangan kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud Purnawarman di Kabupaten Purwakarta, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang terjadi saat ini, terkait dengan pengembangan Situ Buleud, khususnya pada kawasan Purnawarman.

Pengembangan Situ Buleud, sesungguhnya secara normatif tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Pada Kebijakan tersebut, tujuan, arah kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta tertuju pada upaya untuk mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Arah kebijakan tersebut, juga diimplementasikan pada pengembangan kawasan Situ Buleud, dalam artian bahwa pengembangan kawasan Situ Buleud pun harus berwawasan lingkungan.

Belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan kawasan Pasar Rebo Purnawarman sebagai kawasan penunjang dari kawasan Situ Buleud dapat dilihat dari beberapa fenomena masalah berikut:

1. Belum adanya keterlibatan berbagai pihak terkait dalam pengembangan kawasan Pasar Rebo Purnawarman.
2. Ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun prasarana seperti: perparkiran, tempat pembuangan sampah, dan lebar jalan yang belum memadai, pada akhirnya berimplikasi pada berbagai permasalahan eksternalitas negatif.
3. Masih belum baiknya kesadaran masyarakat, baik itu pengunjung, pengguna atau pemilik kendaraan, warga masyarakat setempat, dalam memanfaatkan fasilitas umum yang dipergunakan sebagai prasarana penunjang dalam pengembangan kawasan Pasar Rebo Purnawarman.
4. Beberapa pedagang mengeluh dan khawatir dengan nasib dagangan mereka sepi pembeli. Sehingga mereka menempati trotoar dan menjadikannya tempat untuk berdagang hingga memenuhi dagangannya hingga ke jalan dan menambah kemacetan.

B. METODE / METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif cenderung berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih mengedepankan perhitungan, presentase serta penggunaan perhitungan dengan statistik, sedangkan pendekatan kualitatif lebih menunjukkan segi alamiah, etnografik, lebih melihat kepada fenomenanya (Sugiono, 2010: 2). Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011: 4) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini akan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil pengamatan secara langsung dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni melalui teknik wawancara, observasi dan studi atau telaah dokumen. Wawancara akan dilakukan secara intens dan mendalam kepada berbagai informan kunci. Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara maka peneliti akan menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terlampir. Sedangkan untuk melakukan pengamatan berbagai hal terkait dengan tujuan penelitian ini maka instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi (Moleong:2011, 176).

2. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis data

- a. Setelah melakukan pengumpulan data, diperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Maka peneliti selanjutnya melakukan pengolahan data tersebut (Miles dan Huberman, 1984).
- b. Analisis SWOT merupakan salah satu metode mengembangkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, payek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan

faktor eksternal (luar yaitu strengths, weakness, Opportunities dan threats, metode ini paling sering di gunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan di lakukan analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan hanya memecahkan masalah (freddy, 2014). Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

Model merupakan representasi teori yang disederhanakan tentang dunia nyata (Winarno, 2012). Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan “*A Model of the Policy Implementation*” (1975). Proses ini menekankan sifat kebijakan dalam setiap implementasi kebijakan serta hubungannya dengan isu kebijakan, implementasi kebijakan dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan *performance* kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (1975: 447) menyatakan:

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions intooperational terms, as well ass continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions.”

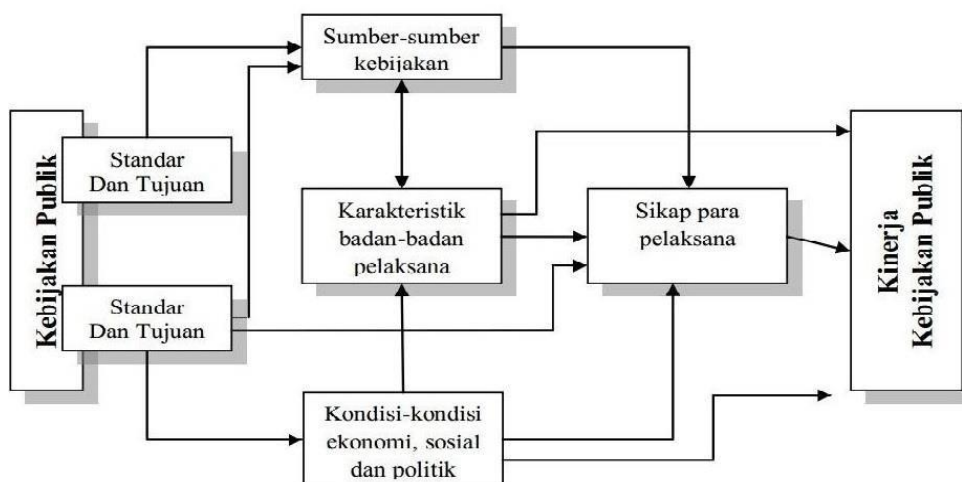
Pendapat ini dapat diterjemahkan sebagai berikut: implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini termasuk upaya satu kali untuk mengubah keputusan menjadi istilah operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Implementasi pada program-program publik akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara komitmen terhadap tujuan relatif tinggi.

Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Menurut beberapa uraian tersebut bahwa implementasi dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan ukuran-ukuran dari tujuan kebijakan itu sendiri, dan para pelaksana pun mempunyai pengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan dan setiap organisasi yang terkait harus selalu menjaga komunikasi pada kegiatan- kegiatan waktu pelaksanaan.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat divisualisasikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1 Model proses Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn

Sumber: Meter dan Van Horn (Wahab, 2002:102)

1. Model Implementasi Van Meter Van Horn

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengembangan Situ Buleud secara normatif tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Kepariwisata di Kabupaten Purwakarta terus dikembangkan dalam menopang pendapatan daerah. Dalam renstra Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dalam misinya yang ketiga.

b. Sumber Daya

publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. George Edward (dalam Tangkilisan, 2003:55-88) sumber daya dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas.

Sumber daya anggaran Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud di Purwakarta tertuang dalam RPJMD Purwakarta 2018-2023.

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari implementor terhadap implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud. Penulis menganalisis ketersediaan sumber daya manusia sudah memadai, akan tetapi koordinasi antara sumber daya manusia itu sendiri masih belum terjalin dengan baik. Banyaknya instansi, stakeholder dan pihak yang terkait dalam kebijakan ini maka diperlukan sinergi yang baik.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana baik pejabat maupun staf Dinas Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta akan efektif apabila cara berpikir, sikap atau perspektif sama dengan Bupati dan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai yang menetapkan kebijakan

- d. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana
Keberadaan Bappelitbangda sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang perencanaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam Perangkat Daerah Tipe A.
- e. Komunikasi Antar Organisasi
Dalam berbagai program implementasi kebijakan, sebuah realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dengan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Dari hasil penelitian diketahui kurang sinerginya komunikasi antar organisasi dan membuat masyarakat berasumsi negative terhadap pemerintah daerah
- f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan, karena lingkungan itu pula yang menjalankan suatu kebijakan. Suatu kebijakan itu ada karena adanya tuntutan dari lingkungan. Lingkungan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Lingkungan social politik di Kabupaten Purwakarta mendukung terhadap terhadap implementasi kebijakan. Terbukti dengan banyak keterlibatan dinas, masyarakat serta stakeholder yang tidak lepas dari usaha para implementator kebijakan dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait. Hal ini juga membuktikan bahwa kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi sangat berhubungan dengan komunikasi dan sumber daya manusia.

2. Faktor Penghambat

Pengembangan Kawasan Pariwisata Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud Kabupaten Purwakarta menjadi PR untuk Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pengembangan Kawasan Pasarebo ini terhambat oleh beberapa permasalahan yang ada yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Beberapa hambatan dalam pengembangan Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- a. Pedagang Pasar Rebo
 - b. Sinergi antara Dinas-Dinas di Kabupaten Purwakarta
 - c. Kesadaran Masyarakat
- ### 3. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan dalam mengevaluasi Strengths (kekuatan). Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (ancaman) dalam suatu proyek. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi proyek dan mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang mendukung dan yang tidak mencapai tujuan tersebut.

Tabel 1 Hasil identifikasi lingkungan strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan perundang – undangan tentang sebagai dasar hukum yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; PP RI nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025; permen pariwisata RI nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota; peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor penyelenggaraan usaha kepariwisataan Adanya komitmen dari Bupati dan juga aparatur Disporaparbud Purwakarta untuk mewujudkan Pelayanan yang professional. Berkembangnya dunia IT untuk dijadikan sarana . 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Disporaparbud. Penambahan anggaran sarana prasarana Pelayanan dan kepuasan masyarakat meningkat. Adanya kerjasama dengan kepolisian lalu lintas Dukungan positif Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa visi dan Misi Pemerintah yang searah, selaras dan berkesinambungan dengan pengembangan bidang pariwisata pemerintah pusat dan pemerintah provinsi jawa barat Upaya pembangunan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan dilaksanakan melalui penataan ruang wilayah perkotaan (RTRW) bersama-sama dengan pihak terkait Adanya dukungan dan peran swasta, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dengan melibatkan stakeholder Jumlah penduduk purwakarta yang berusia produktif lebih banyak di masa yang akan datang sehingga harus lebih kreatif dan inovatif dalam melihat peluang
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Tantangan/ancaman (<i>Treat</i>)
<ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya dana dan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan pariwisata Penggunaan IT dalam menunjang pelayanan pariwisata masih kurang. Adanya keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan yang dilakukan oleh disporaparbud karena 	<ol style="list-style-type: none"> Belum sinergisnya kelembagaan dalam pengembangan pariwisata Belum maksimalnya peran swasta dalam pengembangan pariwisata Peningkatan kompetensi belum dilaksanakan berjenjang dan berkelanjutan melalui sinergitas pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan.

<p>keterbatasan kewenangan yang dimiliki</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan dan penerapan sport tourism belum optimal 5. Jumlah penduduk purwakarta yang berusia produktif lebih banyak di masa yang akan datang sehingga harus lebih kreatif dan inovatif dalam melihat peluang 6. Belum optimalnya sinergi antara industry olahraga, industry pariwisata dan industry lainnya dalam mendukung pengembangan pariwisata di purwakarta 7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di purwakarta
--	--

Dari tabel matriks maka dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor-faktor kunci yang sangat mempengaruhi atau menentukan keberhasilan kinerja atau strategi pengembangan Kawasan Pasar rebo Purnawarman Situ Buleud Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta selalu menjamin keamanan dan ketentraman di Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud Purwakarta.
2. Meningkatkan promosi dan daya tarik dari objek wisata yang berada di kawasan Pasar rebo Purnawarman Situ Buleud Purwakarta untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang lebih baik.
3. Memperbaiki sistem perencanaan serta pengelolaan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih berkembang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus mengoptimalkan pengelolaan Kawasan.
5. Peningkatan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata agar kegiatan ekonomi di Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud Purwakarta meningkat.
6. Memperkuat koordinasi antar pengelola terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata dan perdagangan agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta bisa meningkat.
7. Adanya peningkatan kunjungan wisatawan di Kawasan Situ Buleud maka akan meningkat pedagang kaki lima, harus ada tempat untuk mengkoordinir para pedagang kaki lima untuk berjualan.
8. Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud akan selalu aman dan tentram jika didukung dengan kesadaran masyarakat yang tinggi.
9. Perencanaan dan pengelolaan tata ruang sinkron dengan kebijakan daerah, provinsi ataupun pusat.
10. Adanya peningkatan pedagang kaki lima maka pengelolaan di kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud harus dioptimalkan
11. Peningkatan kesadaran masyarakat dengan adanya pembinaan dari dinas terkait untuk meningkatkan kualitas SDM
12. Keserasian kebijakan harus dilaksanakan agar koordinasi antar pengelola bisa meningkat.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI / CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud di Kabupaten Purwakarta, faktor penghambat dalam implementasi pengembangan Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud di Kabupaten Purwakarta dan strategi pengembangan Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud di Kabupaten Purwakarta. Berikut simpulan dari penelitian ini:

1. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan pariwisata Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud di Kabupaten Purwakarta secara normatif tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Pengembangan kawasan pariwisata Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud merupakan salah satu tujuan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta. Implementasi kebijakan tersebut dianalisis dari unsur standar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, kecenderungan pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Implementasi kebijakan di Kabupaten Purwakarta belum optimal dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Standar dan tujuan kebijakan pengembangan Pariwisata tingkat kabupaten belum jelas di karenakan belum ada kebijakan yang mengatur tentang Rencana Induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Purwakarta. Kemudian adanya kebijakan yang mengatur tentang retribusi namun belum di terapkan mengingat banyaknya kendala/hambatan.
 - b. Sumber daya manusia, anggaran dan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal. Belum berjalan seperti seharusnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19, karena pemerintah daerah harus memfokuskan alokasi anggarannya pada penanganan dampak dari pandemi Covid-19, diantaranya untuk penanganan kesehatan, pengaman jaring sosial masyarakat serta pemulihan ekonomi.
 - c. Badan pelaksana kebijakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi tidak berjalan optimal dan telah ada tim teknis pengembangan pariwisata tingkat kabupaten namun belum optimal.
 - d. Sikap kecenderungan pelaksana yang bervariasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.
 - e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sudah terlaksana tetapi belum optimal, terutama di lingkungan perangkat daerah.
 - f. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi sudah mendukung walaupun belum berdampak pada pencapaian kinerja kebijakan.
2. Masih adanya hambatan dalam implementasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta yang meliputi anggaran dalam hubungan dan komunikasi antara dinas terkait dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta, koordinasi pada setiap instansi dan juga implementator harus diperbaiki, selain itu juga dukungan masyarakat.
3. Strategi yang digunakan dalam Implementasi kebijakan pengembangan kawasan pariwisata Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud di Kabupaten Purwakarta adalah strategi yang menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dimana strategi mempunyai empat isu strategis berupa destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Strategi yang bisa diterapkan dari hasil analisis SWOT yaitu ; Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta selalu menjamin keamanan dan ketentraman di kawasan pariwisata Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud, Meningkatkan promosi dan daya tarik objek wisata yang berada di kawasan pariwisata Pasar

Rebo Purnawarman Situ Buleud untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang lebih baik, Memperbaiki sistem perencanaan serta pengelolaan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih berkembang, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus mengoptimalkan pengelolaan kawasan, peningkatan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata agar kegiatan ekonomi di Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud Purwakarta meningkat, Memperkuat koordinasi antar pengelola terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata dan perdagangan agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta bisa meningkat, Adanya peningkatan kunjungan wisatawan di Kawasan Situ Buleud maka akan meningkat pedagang kaki lima, harus ada tempat untuk mengkoordinir para pedagang kaki lima untuk berjualan, Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud akan selalu aman dan tentram jika didukung dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, Perencanaan dan pengelolaan tata ruang sinkron dengan kebijakan daerah, provinsi ataupun pusat, Adanya peningkatan pedagang kaki lima maka pengelolaan di kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud harus dioptimalkan, Peningkatan kesadaran masyarakat dengan adanya pembinaan dari dinas terkait untuk meningkatkan kualitas SDM, dan Keserasian kebijakan harus dilaksanakan agar koordinasi antar pengelola bisa meningkat.

Rekomendasi

Strategi yang bisa diterapkan dari hasil analisis SWOT yaitu ; Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta selalu menjamin keamanan dan ketentraman di Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud Purwakarta, Meningkatkan promosi dan daya tarik objek wisata yang berada di kawasan Pasar rebo Purnawarman Situ Buleud Purwakarta untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang lebih baik, Memperbaiki sistem perencanaan serta pengelolaan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih berkembang, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus mengoptimalkan pengelolaan Kawasan, Peningkatan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata agar kegiatan ekonomi di Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud Purwakarta meningkat, Memperkuat koordinasi antar pengelola terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata dan perdagangan agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta bisa meningkat, Adanya peningkatan kunjungan wisatawan di Kawasan Situ Buleud maka akan meningkat pedagang kaki lima, harus ada tempat untuk mengkoordinir para pedagang kaki lima untuk berjualan, Kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud akan selalu aman dan tentram jika didukung dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, Perencanaan dan pengelolaan tata ruang sinkron dengan kebijakan daerah, provinsi ataupun pusat, Adanya peningkatan pedagang kaki lima maka pengelolaan di kawasan Pasar Rebo Purnawarman Situ Buleud harus dioptimalkan, Peningkatan kesadaran masyarakat dengan adanya pembinaan dari dinas terkait untuk meningkatkan kualitas SDM, dan Keserasian kebijakan harus dilaksanakan agar koordinasi antar pengelola bisa meningkat.

REFERENSI / REFERENCE

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta. Creswell, J.W. 2014. Dunn, William, 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Pree,.
- Heene, A and Desmidt S, 2015. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. (Disadur dari Strategie En Organisatie Van Publieke Organisaties). Bandung. PT Refika Aditama.

- Jauch, Lawrence R dan Glueck, William F. 1996. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Moleong, L. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit Remaja Karya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung; Alfabeta
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Mulyadi, Dedi. (2011). *Gagasan Pembangunan Purwakarta Berkarakter*. Purwakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2016. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo. Purwanto, E.A dan Robbins, S.P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta. Arcan.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Van Meter, D.S and C.E Van Horn., 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society*
- Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Strategi*. Bandung. PT Refika Aditama. Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus Edisi Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).